



Anggaran Perbaikan Ditaksir Rp1 Miliar

Pemda DIY Inventarisasi Kerusakan Fasilitas Publik di Malioboro

YOGYA, TRIBUN - Sejumlah fasilitas dan infrastruktur di kawasan Malioboro mengalami kerusakan sebagai buntut kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tolak *Omnibus Law*, Kamis (9/10).

Bahkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkirakan kerugian fasilitas yang rusak akibat aksi pada Kamis (8/10) kemarin mencapai ratusan juta.

Beberapa fasilitas gedung wakil rakyat tersebut rusak menjadi sasaran amukan massa yang menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Kerusakan gedung meliputi kaca ruang fraksi, masjid, gerbang

dan sejumlah bangunan yang lainnya.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudianta, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi. Pemeriksaan bangunan yang rusak juga dilakukan. Ia memperkirakan biaya untuk memperbaiki bangunan mencapai ratusan juta.

"Sejauh ini kami belum bisa menghitung secara pasti. Mungkin sampai Rp1 miliar lah. Karena kerusakan lumayan parah," katanya kepada *Tribun Jogja*, Jumat (9/10).

Meski beberapa bangunan masih porak poranda, Huda memastikan

• ke halaman 15

SARPRAS RUSAK

- Kerusuhan dalam aksi unjuk rasa tolak *Omnibus Law* menyisakan kerusakan sejumlah fasilitas di gedung DPRD dan Malioboro.
- Anggaran perbaikan yang dibutuhkan untuk gedung DPRD DIY diperkirakan mencapai Rp1 miliar.
- Kerusakan gedung DPRD DIY meliputi kaca ruang fraksi, masjid, gerbang dan sejumlah bangunan yang lainnya. Taman depan DPRD juga rusak.
- UPT Malioboro mencatat 50 wastafel di sepanjang Malioboro ke arah utara rusak.
- Ada satu bollard di kawasan Malioboro yang pecah.
- Beberapa tempat sampah di Malioboro juga rusak. Aksi vandalisme juga terjadi di tembok dan tiang listrik di Malioboro. Vandalisme ternyata turut mengotori lantai pedestrian yang notabene lebih susah dibersihkan.
- UPT Malioboro juga menerjunkan tim untuk mendata PKL.

Anggaran Perbaikan Ditaksir

• Sambungan Hal 9

kegiatan para wakil rakyat di DPRD DIY masih tetap berjalan normal seperti biasa pada hari ini. "Kami masih bisa lakukan audiensi, rapat-rapat. Kawan-kawan masih bisa berkegiatan seperti semula," imbuh Huda.

Politisi PKS ini menegaskan, demo pada hari Kamis (8/10) sama sekali tidak berpengaruh dengan kinerja DPRD DIY. Pihaknya belum menentukan kapan akan mulai rekondisi bangunan yang rusak tersebut.

"Biar itu disusun pak sekretaris (sekwon). Kan kemarin sampai hari ini (kemarin, **Red**) terus dibersihkan dan pengecekan," ungkapnya.

Ia turut menyesalkan massa aksi yang merusak mobil dari Polda DIY. Seharusnya, lanjut dia, massa tidak perlu merusak fasilitas tersebut. "Ya mereka merusak mobil dari Polda. Ada tujuh atau delapan mobil yang rusak," urainya.

Ia meminta aksi semacam ini tidak kembali terulang di Yogyakarta. Karena, ia menganggap kerusakan dalam ber-aspirasi seperti ini tidak mencerminkan budaya warga Yogyakarta.

Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Malioboro, Ekwanto, mengatakan, dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih, sebagian PKL memilih untuk tak membuka lapaknya dulu. Terlebih, sejak kemarin malam, terdengar selentingan bahwa bakal digelar demo lanjutan, Jumat (9/10).

Prinsipnya, kami tidak

meliburkan. Tapi teman-teman kan lihat kondisi dulu, seperti apa. Informasinya masih akan ada lanjutan aksi lagi. Nah, pedagang mungkin kurang suka ya, memilih lihat situasi dulu. Sekarang kosong sebagian. Terutama yang sekitar DPRD DIY," terangnya.

Kerugian materi

Ia pun memastikan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk melakukan pendataan terhadap para PKL, bilamana ada yang mengalami kerugian materi, akibat demonstrasi tempo hari. Namun, sampai sejauh ini, Ekwanto berjar, belum ada dari kalangan pedagang yang melaporkan kerugiannya.

"Apalagi, PKL kan sudah evakuasi sebelum riuh. Toko, serta PKL sudah kami instruksikan, karena pasti susah sekali untuk untuk mengendalikan massa. Namun, kami tetap melakukan pendataan ya, meski sampai sekarang belum ada laporan masuk dari pedagang," ungkapnya.

Hanya saja, ia mengakui, beberapa fasilitas publik di objek unggulan di kota pelajar itu mengalami kerusakan. Ya, UPT mencatat, wastafel di sepanjang Malioboro ke arah utara, tidak bisa terselamatkan. Alhasil, pihaknya pun harus memutar otak agar wastafel bisa tersedia lagi.

"Keseluruhan itu, ada yang besar, juga kecil, sekitar 50an lah. Kondisinya sudah rusak itu, ringsek dan sebagainya. Tempat airnya juga banyak yang hilang," tandasnya.

Lalu, ada satu *bollard* yang pecah. Taman depan DPRD juga rusak, tapi sedang dalam perbaikan. Tempat-tempat sampah yang sebelum

demo kemarin kita perbaiki, sekarang banyak yang lepas, karena kemarin itu berterbangan. semua harus segera kami benahi kembali," tambah Ekwanto.

Tidak berhenti sampai di situ, ia juga mengeluhkan coretan-coretan massa aksi, dengan kata-kata yang kurang pantas. Parahnya, selain menyasar tembok, atau tiang listrik di Malioboro, vandalisme ternyata turut mengotori lantai pedestrian yang notabene lebih susah dibersihkan.

Inventarisasi

Pemerintah DIY belum bisa menaksir total kerugian akibat kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya satu restoran di kawasan Malioboro. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji, menyebut, pihaknya telah menyiapkan keperluan inventarisasi kerugian akibat kerusakan di gedung DPRD kemarin.

Pria yang akrab disapa Aji ini mengatakan saat ini baru menyusun inventarisasi kerusakan yang ada. Terdapat tiga unsur yang perlu dilakukan inventarisasi. "Tiga unsur itu gedung DPRD, yang kedua pedestrian Malioboro, lalu yang ketiga itu punya pihak swasta yakni restoran Legian," katanya kepada wartawan.

Ia meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY dan Pemkot Yogyakarta untuk mendata bangunan yang mengalami kerusakan. Harapannya aktivitas di kawasan Malioboro dapat kembali pulih dan tidak ada lagi tanda-tanda bekas kerusuhan massa aksi. (**aka/hda**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005